

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta)



PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi strata I pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun Oleh:

RIZAL RICKY RINALDI

B 200 120 163

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

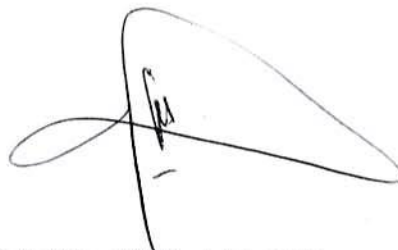
Oleh:

RIZAL RICKY RINALDI

B 200 120 163

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a vertical line on the right, with a small horizontal stroke at the bottom.

(Drs. Atwal Arifin, M.Si, Akt, CA)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta)

Yang ditulis oleh:

RIZAL RICKY RINALDI

B 200 120 163

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 30 April 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Dewan Penguji:

1. Drs. Atwal Arifin, M.Si, Akt, CA

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Dr. Triyono, SE, M.Si

(Anggota 1 Dewan Penguji)

()

3. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si

(Anggota 2 Dewan Penguji)

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
Dr. Triyono, SE, M.Si

NIK. 642/0627016801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 April 2016

Yang Menyatakan



Rizal Ricky Rinaldi

B 200 120 163

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan, pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan, pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan berbentuk angka-angka. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan penentuan sampel untuk tiap SKPD ditentukan secara proporsional. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Kata Kunci: *good governance*, audit kinerja, standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas keuangan.

Abstract

The study aimed to find out the effect of good governance on the financial accountability, the effect of performance audit on the financial accountability, and the effect of accounting standards of government on the financial accountability. This was a quantitative study conducted on the unit of local devices Surakarta regency, because the data collected in the forms of figures. The samples were determined proportionally on each unit of local devices (SKPD) based on the purposive sampling techniques. The analysis was made based on multiple linear regression supported by SPSS v.21 program. The results indicated that good governance had a positive and significant effect on the financial accountability, performance audit had a positive and significant effect on the financial accountability, and accounting standards of government had a positive and significant effect on the financial accountability.

Keyword: *good governance, performance audit, accounting standards of government, financial accountability.*

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas.

Bersatu dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau amanah (*good governance*) yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Pengertian *good governance* menurut (Mardiasmo, 2002) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik.

Audit pada organisasi sektor publik tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun juga audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, pengertian audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Alasan pentingnya dilakukan audit kinerja adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, selain itu audit kinerja juga sebagai alat evaluasi dan pengarah dalam pengalokasian sumber dana masyarakat, karena dengan dilakukannya audit kinerja akan terwujud pengendalian terhadap kinerja dari pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah.

Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana. Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan, persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan.

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan akuntabilitas keuangan. Penelitian Elvira Zeyn (2011) menyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan penelitian Azlim dkk (2012) menyatakan bahwa ada pengaruh antara penerapan *good governance* dengan akuntabilitas keuangan. Lalu Ni Made Suratmi dkk (2014) menyatakan bahwa audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik hal ini berarti semakin baik audit kinerja, maka akan terjadi peningkatan kinerja pegawai dalam membuat atau menyusun laporan keuangannya. Selanjutnya penelitian dari Wayan Kusuma Wiraputra dkk (2014) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman SAP seorang pegawai, maka semakin tinggi tingkat penyusunan laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Elvira Zeyn (2011) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Good Governance

Pengertian *good governance* menurut (Mardiasmo, 2002) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif pada kinerja sektor publik atas ekonomi dan efisiensi suatu program, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, fungsi yang melakukan aktifitas dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Harun,2009).

Standart Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi (Mardiasmo,2012).

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah, antara lain

Penelitian yang dilakukan oleh Evira Zeyn (2011) yang berjudul “Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen yaitu *good governance* dan standar akuntansi pemerintah, sedangkan variabel dependen atau terikatnya yaitu akuntabilitas keuangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, kemudian standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan penelitian dari Azlim dkk (2012) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Adapun penelitian yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu dari Wiraputra dkk (2014) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi pada SKPD di Kabupaten Klungkung). Memperoleh hasil bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni made dkk (2014) dengan judul “Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksebilitas laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik”. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen audit kinerja, penyajian laporan keuangan dan aksebilitas laporan keuangan, sementara itu variabel dependen adalah akuntabilitas publik. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik yang tercermin dalam laporan keuangannya, begitu juga dengan variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksebilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan Chandra dan Maestro (2013) yang berjudul “Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor”. Memperoleh hasil bahwa audit kinerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan oleh Elvira Zeyn (2011), Ni Made (2014), Chandra dan Maestro (2013), Azlim dkk (2012), dan Wiraputra dkk (2014). Kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penggunaan variabel independen penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintah pada penelitian Elvira Zeyn dan Azlim dkk, ditamba variabel independen standar akuntansi pemerintahan dari Wayan Kusuma Wiraputra dkk dan variabel audit kinerja pada penelitian Ni Made dkk. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggabungan variabel independen dari dua penelitian terdahulu, selain itu perbedaannya juga terletak dari obyek penelitian, penelitian dari Elvira Zeyn mengambil obyek pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Bandung, untuk penelitian yang dilakukan Ni Made mengambil obyek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Buleleng. Pada penelitian ini mengganti objek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kota Surakarta.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Penerapan *Good Governance*, menuntut pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang didasarkan pada prinsip transparansi, bertanggungjawab, partisipasi, keadilan, kemandirian, mudah dipahami dan sebenar-benarnya (Cadbury, 1992 dalam Elvira Zeyn, 2011).

Pengaruh penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah dibuktikan oleh hasil penelitian Elvira Zeyn (2011) dan Azlim dkk (2012) yaitu penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.

H₁: Penerapan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hubungan dilakukannya audit kinerja terutama dibagian yang langsung terkait dengan pengelolaan keuangan dengan kualitas pelaporan dari laporan keuangan daerah akan sangat besar. Pengaruh tersebut terkait dengan audit kinerja yang minitikberatkan kepada pemeriksaan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang menggambarkan kinerja dari pegawai yang terkait dengan pengelolaan laporan keuangan mulai dari penganggaran, penggunaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pemerintah atas dana masyarakat yang dikelolanya.

Pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan dibuktikan oleh hasil penelitian Ni Made dkk (2014) dan Chandra (2013) yaitu audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan

H₂: Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Standar Akuntabilitas Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Standar akuntansi pemerintah sebagai dasar atau pedoman dari penyusunan laporan keuangan pada pemerintah sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan karena standar yang harus dipenuhi oleh sebuah laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Selain itu hal yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mengandung kejujuran artinya informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah yang mengelola dana masyarakat berisi informasi yang sebenar-benarnya.

Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah dibuktikan oleh hasil penelitian Elvira Zeyn (2011), Azlim dkk (2012), dan Wiraputra dkk (2014) yaitu standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.

H₃: Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

3. Metode

Jenis, Populasi, dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian primer kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yg berada di dinas Kota Surakarta. Berdasarkan atas pertimbangan tertentu, alasan penggunaan metode *purposive sampling* didasari atas pertimbangan agar sampel data yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji. Kriteria dalam penentuan sampel berdasarkan teknik *purposive sampling* antara lain:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Kepala bagian akuntansi/Penatausahaan keuangan
- 3) Kepala Sub bagian akuntansi/Penatausahaan keuangan

Variabel Independen

Penerapan *Good Governance*

Penerapan *good governance* diukur dengan beberapa indikator yang mengacu pada penelitian Elvira Zeyn (2011), yaitu: partisipasi, akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, daya tangkap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi

Audit Kinerja

Indikator audit kinerja mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Ni Made dkk (2014), yaitu: ekonomis, efisien, efektif, obyektifitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator standar akuntansi pemerintahan mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Elvira Zeyn (2011), yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dapat diperbandingkan.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan. Pengukuran variabel akuntabilitas keuangan diukur dengan menggunakan lima indikator pertanyaan, yaitu: kejujuran, ketepatan, kompetensi, keselarasan, pengambilan kebijakan. Semua pertanyaan diukur dengan skala *likert* 1 sampai 5.

Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu melihat pengaruh apa saja mengenai kualitas audit. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$AKKEU = a + 1PGG + 2AK + 3SAP + e$$

Keterangan:

AKKEU	: akuntabilitas keuangan
PGG	: penerapan <i>good governance</i>
AK	: audit kinerja
SAP	: standar akuntansi pemerintahan
a	: Konstanta
x	: Koefisien regresi
e	: <i>Error</i>

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi obyek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dinas di SKPD Kota Surakarta. Berdasarkan data yang diakses dari (www.surakarta.go.id) diperoleh informasi ada 14 dinas yang ada di Kota Surakarta. Disini peneliti mengambil sampel disetiap dinas sebanyak 5 orang yang bekerja dibagian keuangan, jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 70 kuesioner, sedangkan jumlah seluruh kuesioner yang kembali dan dapat diolah oleh peneliti sebanyak 63 kuesioner.

Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini bahwa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Jadi model regresi layak untuk dipakai.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1
Hasil analisis regresi berganda

Variabel		t_{hitung}	Sig
Konstanta	7,7272	1,630	0,109
Penerapan Good Governance	0,154	2,631	0,011
Audit Kinerja	0,125	2,141	0,036
Standar Akuntansi Pemerintahan	0,613	4,014	0,000
R Square	0,505	F_{hitung}	20,038
Adjusted R Square	0,479	Probabilitas F	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, 2016

Dari hasil pebelitian maka dapat diperoleh persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$AKKEU = 7,272 + 0,154 PGG + 0,125 AK + 0,613 SAP + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 7,272 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila *good governance*, audit kinerja dan standar akuntansi pemerintah dianggap konstan (tetap), maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 7,272.

Koefisein regresi variabel *good governance* diperoleh sebesar 0,154 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan *good governance* akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,154 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (tetap).

Koefisein regresi variabel audit kinerja diperoleh sebesar 0,125 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan audit kinerja akan akuntabilitas keuangan sebesar 0,125 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (tetap).

Koefisein regresi variabel standar akuntansi pemerintah diperoleh sebesar 0,613 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan standar akuntansi pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,613 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (tetap).

5. DISKUSI

Pembahasan didalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan dan tiga variabel independen yaitu penerapan *good governance* (PGG), audit kinerja (AK), standar akuntansi pemerintahan (SAP)

Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan

Good governance dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan (H_1 diterima). Dengan nilai signifikasi variabel *good governance* $0,011 < 0,05$. *Good governance* yang baik menghendaki dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan laporan keuangan yang baik, melalui dari penganggarannya, penggunaannya sampai dengan pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap dana yang berasal dari masyarakat luas, sehingga akuntabilitas keuangan dapat tercapai.

Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah akan akuntabel jika memenuhi semua prinsip *good governance*, dengan pemenuhan dasar-dasar pelaporan keuangan yang merupakan prinsip *good governance* maka pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah dengan sendirinya akan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan dari masyarakat. Terpenuhinya dasar-dasar pelaporan keuangan tersebut juga dapat mencapai kemakmuran dan kemajuan daerah karena sumberdaya daerah akan dikelola untuk tujuan pelayanan masyarakat. Jadi, pemerintah yang telah menerapkan *good governance* maka laporan keuangannya lebih akuntabel.

Secara empiris hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvira Zeyn (2011) dan Azlim dkk (2012) yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.

Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan

Audit kinerja dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap terhadap akuntabilitas keuangan (H_2 diterima). Dengan nilai signifikansi variabel audit kinerja $0,036 < 0,05$. Artinya untuk mendapatkan akuntabilitas keuangan yang baik maka harus dilakukan audit kinerja yang dilakukan sesuai dengan prinsip audit yang dilakukan secara spontan atau tanpa terencana untuk menghindari adanya manipulasi data yang akan diaudit, dengan melakukan audit kinerja yang spontan maka akan dapat terlihat suatu strategi yang telah diterapkan dalam sistem kinerja telah berjalan sesuai rencana atau melenceng.

Audit kinerja yang dilakukan dengan baik juga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh bagian atau fungsi terkait tetap terjaga atau tidak. Keberhasilan strategi dalam sistem kinerja juga tercermin dari kualitas laporan keuangan sebagai pertanggung-jawaban dari pemerintah. Audit kinerja yang minitik-beratkan kepada pemeriksaan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang menggambarkan kinerja dari pegawai yang terkait dengan pengelolaan laporan keuangan mulai dari penganggaran, penggunaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pemerintah atas dana masyarakat yang dikelolanya.

Secara empiris hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Suratmi dkk (2014) dan Chandra (2013) yang menyatakan bahwa audit kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Standar akuntansi pemerintah dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap terhadap akuntabilitas keuangan (H_3 diterima). Dengan nilai signifikansi variabel standar akuntansi pemerintah $0,000 < 0,05$. Dengan standar akuntansi pemerintah yang baik, akuntabilitas keuangan juga akan menjadi baik, karena standar yang harus dipenuhi oleh sebuah laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Selain itu hal yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mengandung kejujuran artinya informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah yang mengelola dana masyarakat berisi informasi yang sebenar-benarnya.

Setiap laporan yang disusun oleh pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mencapai tujuan atau hasil yang telah direncanakan oleh pemerintah serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah tersusun dan terstruktur dengan rapi sebelumnya. Standar-standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dilakukan untuk peningkatan akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah sehingga informasi yang diperoleh pihak-pihak terkait dengan laporan keuangan tersebut berkualitas, sehingga meningkatkan pula kepercayaan dari semua pihak terhadap pemerintah daerah.

Secara empiris hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvira Zeyn (2011), Wiraputra dkk (2014), dan Azlim dkk (2012) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh *good governance*, audit kinerja dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,011 < 0,05$), sehingga hipotesis pertama diterima. Artinya *good governance* yang baik, maka akan mengakibatkan akuntabilitas keuangan juga akan menjadi meningkat.
- b. Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,036 < 0,05$). Sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya semakin baik dan ada audit kinerja, maka akuntabilitas keuangan juga akan semakin meningkat.
- c. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,000 < 0,05$). Sehingga hipotesis ketiga diterima. Artinya maksimalnya standar akuntansi pemerintah akan menjadikan semakin maksimal juga akuntabilitas keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Suratmi, Ni Made; Trisna, Nyoman; Ari Nyoman. 2014. *Pengaruh Audit Kinerja Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik*. E-Jurnal. Volume 2. No 1. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar, 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi, Volume 1, Nomor 1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Zeyn, Elvira. 2011. *Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan. Volume 1. No 1. Hal 21-37. Universitas Pasundan, Bandung
- Wiraputra, Wayan Kusuma, Sinarwati, Ni Kadek, Nyoman Trisna Herwati, 2014. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Klungkung)*. E-jurnal S1 Ak, Volume 2, Nomor 1. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro
- Pribadi, Chandra dan Maestro Giovanni, 2013. *Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi, Volume Semester II. Universitas Pakuan, Bogor
- Lembaga Administrasi Negara
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.